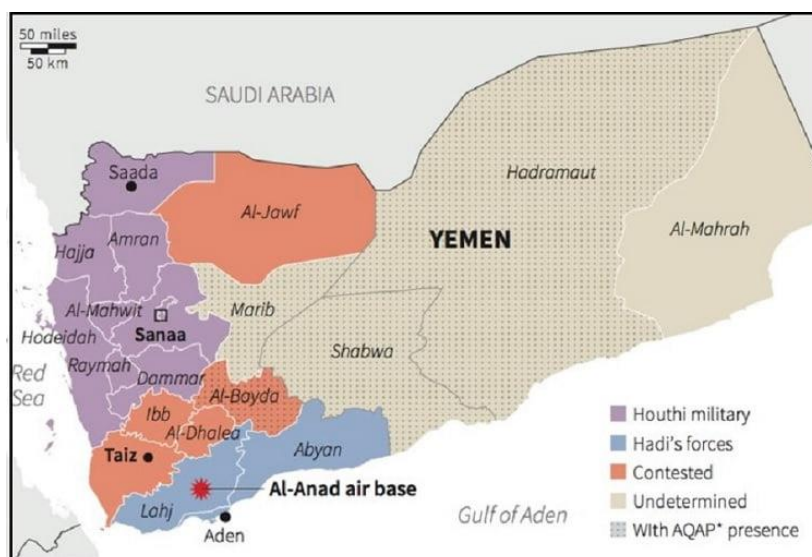


BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Republik Yaman adalah salah satu negara di Asia Barat yang merupakan bagian dari kawasan Timur Tengah. Yaman memiliki luas wilayah 527,968 km² dengan jumlah penduduk 28 juta jiwa (2017). Negara juga berbatasan langsung dengan Arab Saudi di sebelah utara dan Oman di sebelah timur. Yaman merupakan sebuah negara yang terbagi menjadi dua yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Alasan mengapa negara ini terpisah menjadi dua adalah karena wilayah tersebut dibagi oleh kerajaan Ottoman dan Inggris. Dengan terpisahnya kedua wilayah tersebut tentunya terdapat perbedaan diantara keduanya sehingga memunculkan konflik dan perpecahan di Yaman (Dickson, 2022).



Gambar 1.1 Peta Yaman (Dakira, 2019).

Pada tanggal 22 Mei 1990 terjadi kesepakatan antara pemerintahan Yaman Utara dan Yaman Selatan untuk melakukan unifikasi. Akhirnya setiap tanggal 22 Mei tersebut diperingati sebagai Hari Penyatuan Yaman (*Yaman Unification Day*). Setelah terjadi kesepakatan unifikasi tersebut, Yaman dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh sebagai presiden. Saleh dikenal sebagai seorang pemimpin bertangan besi yang telah menimbulkan banyak penderitaan sehingga pada 2012 akhirnya diganti oleh Presiden Mansur Hadi. Yaman merupakan sebuah negara yang telah melalui banyak konflik antara gerakan separatis dan negara lain, hal inilah yang membuat pemerintahan Yaman hancur perlahan. Selain itu kehancuran pemerintah Yaman juga menjadi penyebab munculnya kelompok pemberontak yang semakin memperburuk kondisi Yaman dikemudian hari.

Konflik di Yaman merupakan efek dari peristiwa sebelumnya terjadi selama beberapa tahun sebelumnya. Dengan diawali oleh peristiwa *Arab Springs*, yang berlangsung pada 2010 lalu. Akhirnya Pada tahun 2014 terjadi perang sipil di Yaman, konflik tersebut muncul karena adanya perbedaan pendapat antara dua kubu. Kubu pertama yaitu kaum separatis yang pro terhadap Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi dan yang kedua merupakan kelompok Houthi. Houthi merupakan sebuah kelompok pemberontak yang menganut aliran Syiah, bahkan kelompok ini mempunyai sejarah hubungan yang erat dengan Iran dan juga sejarah pemberontakan terhadap pemerintahan Sunni. Gerakan Houthi berdiri karena merupakan bentuk respon terhadap ketakutan kelompok Zaidi Syiah terhadap aliran Sunni (Freeman, 2009). Seiring berjalannya waktu konflik ini semakin membesar dan sulit dikendalikan hingga memakan sangat banyak korban jiwa. Puncaknya pada 21 September 2014, ibukota Yaman, Sanna, diambil alih oleh kelompok Houthi dan Presiden Hadi mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemindahan ibukota ke Aden. (Putra R. P., 2019). Akhirnya pada 2015 Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi melakukan perjalanan ke Arab Saudi yang tujuannya yaitu untuk meminta bantuan Internasional kepada Arab Saudi atas konflik yang terjadi.

Akhirnya pada 2015 Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi melakukan perjalanan ke Arab Saudi yang tujuannya yaitu untuk meminta bantuan Internasional kepada Arab Saudi atas konflik yang terjadi. Pada 26 Maret 2015 Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi akhirnya memutuskan untuk menggempur Houthi dengan bantuan dari Saudi. Tujuan Arab Saudi menggempur Yaman saat itu adalah untuk membuat jera Houthi yang dalam hal ini kelompok Houthi berkembang sangat cepat serta membantu Iran untuk memasuki wilayah Yaman. Selain itu Arab Saudi juga mengusahakan memberikan pemerintahan yang sah kepada Yaman. Amerika Serikat yang notabnya merupakan sekutu lama Saudi juga turut andil dalam konflik ini dengan memeberikan bantuan berupa logistik dan juga inteljen guna membantu Arab Saudi melancarkan aksinya (Aljazeera, 2015). Arab Saudi juga melakukan kerjasama dengan koalisi lainnya seperti Joradania, Bahrain, Mesir, Maroko dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi melancarkan serangan besar-besaran di Yaman untuk memberantas kelompok Houthi. Setidaknya Arab Saudi mengerahkan sekitar 100 pesawat tempur dan 150 ribu tentara untuk membombardir pangkalan udara, pusat komando dan gudang senjata kelompok Houthi yang tujuannya untuk mematikan pergerakan kelompok ini (BBC, 2015).

Pada tahun 2016 kembali muncul kekuatan mantan Presiden Saleh dengan langsung menjalin kerjasama dengan Houthi dengan hasil terbentuklah sebuah dewan bernama *'political council'* dengan tujuan untuk menguasai ibukota dan Yaman bagian utara. Akan tetapi pada tahun 2017, Saleh justru melakukan pengkhianatan dan menyerang Houthi (Edroos, 2017). Tentunya hal itu membuat situasi di Yaman semakin tidak terkendali. Perang sipil yang terjadi di Yaman mengikutsertakan Arab Saudi ke dalamnya karena mengancam stabilitas keamanannya sehingga dalam hal ini Arab Saudi menjadi aktor baru yang turut membantu Presiden Hadi dalam rangka melawan Houthi dan Iran. Kekacauan yang terjadi di Yaman diklasifikasi sebagai krisis kemanusiaan terburuk karena diperkirakan terdapat lebih dari 15.000 korban jiwa dan sebanyak 22 juta warga Yaman kelaparan sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, jadi dapat dikatakan bahwa konflik ini telah melanggar hukum humaniter internasional (Clarke, 2019).

Guna mempertegas kebaruan dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengambil penelitian terdahulu untuk membandingkannya. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fozia Jan dan Shazia Majid yang berjudul *"Yemen Crisis and the Role of Saudi Arabia"* (Majid, 2017). Penelitian ini menjelaskan mengenai peran Arab Saudi dalam krisis yang terjadi di Yaman. Bekerja sama dengan Amerika Serikat, Arab Saudi memiliki pilihan untuk membagi Yaman sebagai alat untuk mengurangi pergeseran strategis dari kemenangan Houthi. Penelitian kedua adalah *"Saudi Arabia – Iran's Foreign Policy Crisis: A Case Study of Execution of Saudi Shia Cleric Shaikh Nimr al-Nimr"* (Mamadkul, 2017) yang ditulis oleh Jirajoj Mamadkul. Artikel ini menjelaskan hubungan Arab Saudi – Iran yang telah mengalami konflik berkepanjangan sejak revolusi Iran 1979 semakin memburuk dengan dieksekusinya ulama Syi'ah Himh alim Nimr al-Nimr oleh Arab Saudi.

Berdasarkan literatur penelitian sebelumnya mengenai konflik di Yaman belum membahas mengenai faktor-faktor yang menjadikan Arab Saudi akhirnya turut terlibat pada konflik di Yaman dengan melakukan berbagai macam intervensi. Maka dari itu penulis akan menjabarkan berbagai faktor yang menjadikan Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk mengintervensi konflik Yaman menggunakan konsep kepentingan nasional serta pendekatan teori realisme.

1.2. Jangkauan Penelitian

penelitian ini akan dibatasi berdasarkan jangka waktu dan fokus analisis. Pada jangka waktu penulis menentukan rentang waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal ini diawali pada 2015, ketika Saudi untuk pertama kalinya memutuskan untuk melakukan intervensi militer ke Yaman sampai dengan tahun 2019. Selain itu pada kurun waktu tersebut pihak Arab Saudi turut mengalami berbagai hambatan-hambatan. Sedangkan pada fokus analisis, penulis akan menggunakan alasan Arab Saudi dibawah pemerintahan Mohammed bin Salman dalam melakukan intervensi militernya ke Yaman.

1.3. Rumusan Masalah

Merujuk kepada latar belakang dan jangkauan penelitian diatas, akhirnya penulis menemukan sebuah pertanyaan yaitu, **“Apa faktor yang mendorong Arab Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman?”**

1.4. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis menggunakan teori dan juga konsep yang digunakan sebagai alat analisis terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian ini, maka penulis akan menggunakan:

1.4.1. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest Concept*)

Pada penelitian ini, penulis akan mencoba menilik faktor-faktor yang menjadikan Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk melakukan intervensi pada konflik Yaman dengan tujuan memenuhi kepentingan nasionalnya menggunakan konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah sebuah konsepsi yang memiliki peran vital bagi sebuah negara. Kepentingan nasional juga dijadikan faktor yang turut berperan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri bagi negara. Selain itu, kepentingan nasional juga merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara (Putera, 2017).

Sejalan dengan pendapat Hans Morgenthau, ia menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan hal yang paling fundamental dalam memberikan dukungan terhadap politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. selain itu, perilaku negara dalam menjalankan hubungan internasionalnya selalu mengikutsertakan kepentingan nasional guna meraih *power* yang hendak dicapai (Mas'oed, 1990).

Kepentingan nasional mempunyai keterkaitan dengan kekuatan suatu negara baik sebagai tujuan maupun instrumen yang sifatnya *hard power*. Ketika kepentingan nasional digunakan untuk mencapai sebuah hegemon maka akan memiliki konsekuensi berupa munculnya berbagai konflik di sistem internasional. Jika kita melihat sejarah yang ada ketika sebuah negara mengedepankan kepentingan nasional beserta konsekuensinya, dapat dilihat bahwa yang terjadi adalah hubungan internasional memiliki sifat yang konfliktual (Bainus & Rachman, 2018).

Menurut Donald E. Nuechterlein kepentingan nasional dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian yaitu, *ideological interest*, *world order interest*, *economic interest*, dan *defence interest*. Bagian pertama yang dijelaskan oleh Nuechterlein adalah kepentingan ideologi, kepentingan ideologi ditujukan sebagai suaka terhadap seperangkat nilai yang secara universal dimiliki oleh suatu negara sehingga menjadi sebuah landasan moral bagi negara dalam memutuskan segala tindakan dan kebijakannya. Kedua, yaitu kepentingan tatanan dunia yang tujuan adalah menjaga stabilitas politik internasional. Ketiga, kepentingan ekonomi merupakan eskalasi ekonomi negara dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Dan yang terakhir kepentingan pertahanan, bagian ini mencakup jaminan perlindungan baik bagi negara dan rakyatnya dari berbagai ancaman (Nuechterlein, 1976).

1.4.2. Teori Realisme Ofensif

Teori neorealisme ini digunakan penulis untuk memahami tindakan intervensi militer Arab Saudi ke Yaman. Secara garis besar teori neorealisme dapat dikategorikan kedalam dua jenis teori yaitu realisme ofensif dan realisme defensif. Realisme ofensif merupakan teori yang dikemukakan oleh John Mearshimer. Teori ini beranggapan bahwa sistem internasional yang anarki memaksa sebuah negara untuk menjadi yang paling dominan di sistem internasional (S et al., 2019).

Selain itu, Mearshimer juga mengungkapkan bahwa negara akan terus berusaha guna mencapai hegemoni. Setidaknya Mearshimer mengungkapkan tiga faktor yang memengaruhi ambisi sebuah negara untuk menjadi hegemon. Pertama, faktor yang disampaikan oleh Mearshimer adalah tidak ada suatu pemerintah diatas pemerintah ataupun lembaga internasional yang mampu memberikan jaminan keamanan bagi sebuah negara. Kedua, dikatakan bahwa setiap negara memiliki kekuatan militer dan tentunya dapat digunakan sebagai alat untuk mengancam kedaulatan negara lain. Dan faktor yang terakhir

adalah tidak ada negara yang mampu mengetahui maksud dan tujuan dari negara lain (Mearshimer, 2014). Ketika suatu negara mencapai puncak hegemoni maka secara tidak langsung negara tersebut akan menjadi sebuah negara *super power* didalam sistem internasional tersebut. Oleh karena itu, negara yang notabnya merupakan aktor utama dalam sistem internasional sangat berperan penting dalam mengamati kebijakan yang ditujukan pada isu keamanan nasional.

Setiap negara tentunya berusaha untuk menghindari terjadinya konflik dengan negara lainnya. Tindakan yang dilakukan sebuah negara tentunya memiliki konsekuensi berbeda, maka dari itu sudah semestinya setiap negara untuk menyeleraskan pandangan dan pemikirannya masing-masing untuk mencapai perdamaian yang diinginkan. Akan tetapi memang pada perjalannya usaha yang dilakukan memiliki hambatan berupa perbedaan pendapat dan tanggapan. Perbedaan inilah yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan antar masing-masing negara akibat dari munculnya berbagai perspektif sehingga dapat menimbulkan konflik.

Guna memahami lebih lanjut mengenai keamanan nasional, penulis akan terlebih dahulu membahas mengenai keamanan. Keamanan adalah sebuah instrumen penting bagi sebuah negara. Menurut para ahli studi hubungan internasional, konsep keamanan merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari berbagai macam ancaman termasuk ancaman militer (Perwita, 2008). Ancaman militer memiliki dampak yang sangat signifikan bagi stabilitas keamanan suatu negara. Maka dari itu ancaman militer menjadi fokus utama pada konteks ketahanan nasional sebuah negara karena memiliki keterkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Biasanya ancaman militer dilakukan demi kepentingan politik seperti merebut suatu wilayah atau kudeta pemerintahan yang sah (Buzan, People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations, 1983). Ancaman-ancaman ini mengakibatkan munculnya sifat kecurigaan antar para negara, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya sebuah konflik. Konflik merupakan kondisi dimana para aktor berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu.

Konflik yang terjadi di Yaman merupakan konflik internal yang menyita perhatian internasional. Hal ini didasari oleh beberapa faktor seperti struktural, politik, ekonomi dan persepsi yang membuat suatu negara stabilitas negara terganggu. Selanjutnya, dengan munculnya *bad leaders* yang disebabkan oleh situasi politik yang kurang stabil dan hal ini menjadi konfrontasi antar beberapa pihak. Selain itu juga konflik mengikutsertakan

negara lain di kawasan Timur Tengah makin memperburuk kondisi Yaman. Hal inilah yang membuat konflik Yaman sangat sulit dikendalikan sehingga akan sulit ditemukan jalan keluarnya (Andini et al., 2021).

Arab Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman dengan tujuan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Intervensi sendiri memiliki definisi yaitu tindakan suatu negara untuk ikut campur ke dalam masalah negara lain karena dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun, dibalik itu tentunya terdapat alasan lain yang menyebabkan Arab Saudi akhirnya melancarkan aksi intervensi militernya. Penulis beranggapan bahwa alasan utama dari intervensi itu adalah mendukung pemerintahan Presiden Hadi dengan tujuan untuk memenangkan konflik yang berlangsung sehingga nantinya dapat menjadi suatu pemerintahan yang legal.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa intervensi militer Arab Saudi merupakan salah satu bagian dari *survival* yang memiliki kaitannya terhadap kepentingan nasional. Kepentingan nasional sendiri merupakan salah satu pemikiran dari Morgenthau. Kepentingan nasional memiliki peran signifikan yang menjadi faktor pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara yang tujuannya untuk memperoleh *power*. Dalam pembentukan kebijakan luar negeri tentunya membutuhkan pemikiran rasional sehingga menghasilkan kebijakan yang maksimal (Morgenthau, 2005).

1.5. Hipotesa

Adapun hipotesa yang diambil penulis berdasarkan rumusan masalah yang didasarkan pada penggunaan teori realisme ofensif dan konsep kepentingan nasional terkait kepentingan nasional Arab Saudi yang menjadi faktor tindakan intervensi militer ke Yaman adalah sebagai berikut:

1. Arab Saudi berusaha untuk menunjukkan hegemoninya di Kawasan Timur Tengah.
2. Arab Saudi ingin mengalahkan Iran dalam memberikan pengaruh ideologi yaitu Islam Sunni.
3. Arab Saudi juga ingin menunjukkan bahwa merekalah yang mampu memberikan jaminan kestabilan sistem politik internasional bagi rakyat.
4. Arab Saudi ingin menjaga stabilitas keamanan negaranya.

1.6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadikan Arab Saudi terlibat ke dalam konflik di Yaman serta langkah-langkah Arab Saudi dalam rangka mempertahankan dominasinya di kawasan Timur Tengah. Selain itu penulis juga akan memberikan historis hubungan Saudi dan Iran hingga terjadinya perang dingin antar kedua negara tersebut pada konflik di Yaman.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dengan sumber data berupa jurnal, buku, artikel berita dan website. Selain itu penelitian ini menggunakan model pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara terperinci. Selain itu pendekatan ini digunakan penulis guna memahami secara mendalam mengenai suatu kejadian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan teori dan data yang ditemukan terkait kepentingan Arab Saudi dalam melakukan intervensi militer ke Yaman.

1.8. Sistematika Kepenulisan

Sistematika kepenulisan skripsi bertujuan untuk memudahkan pemahaman penulis dalam proses penyusunan skripsi. Secara umum, dalam kepenulisan skripsi biasanya terbagi kedalam beberapa bab, yaitu:

BAB I, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika kepenulisan.

BAB II, pada bab ini penulis akan menguraikan konflik yang terjadi di Yaman beserta dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini. Penjelasan akan diawali dengan faktor-faktor terjadinya konflik di Yaman.

BAB III, Pada bab ini penulis akan menguraikan upaya yang dilakukan Arab Saudi dalam intervensinya di Yaman guna mengamankan kepentingan nasionalnya. Diawali dengan menjelaskan kepentingan Arab Saudi melakukan intervensi ke Yaman serta dikorelasikan dengan kondisi yang terjadi sesuai dengan teori Realisme Ofensif dari Mearsheimer dengan tujuan sebagai instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

BAB IV, pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memuat saran sehubungan dengan kesimpulan yang dimaksud, serta diakhiri dengan kata penutup.